HARIAN UMUM NusaBali

Alat Kesehatan untuk IRD Dirancang Tahun 2016 ✓

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng mulai memikirkan pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk menunjang operasional gedung Intalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Buleleng. Langkah itu menyusul, pembangunan tahap pertama gedung IRD tersebut telah berjalan sesuai rencana.

"Kita akan usahakan di tahun 2016, sehingga di akhir tahun 2016 nanti, IRD ini sudah bisa beroperasi," ungkap Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat meninjau proyek gedung IRD RSUD Buleleng, di Jalan Ngurah Rai, Singaraja, Kamis (13/8).

Bupati turun ke lokasi didampingi Wakil Bupati Nyoman Sutjidra dan Dirut RSUD Buleleng, dr Gede Wiartana. Pengadaan alkes tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua gedung IRD RSUID tersebut. Tahap kedua tersebut merupakan tahap finishing dari proyek IRD hingga ditarget sudah bisa beroperasi akhir tahun2016 nanti.

Sejauh ini, kebutuhan dana pada tahan finishing termasuk dana pengadaan alkes masih dihitung, sehingga dalam APBD tahun 2016 nanti, kebutuhan dananya bisa dialokasikan. "Ini kan baru tahap pertama fisiknya saja, selanjutnya tahap kedua nanti adalah bagian finisihing sekaligus pengadaan alkesnya," ujar Bupati Putu Agus.

Saat meninjau lokasi, Bupati juga minta agar pihak rekanan tetap memperhatikan kwalitas pekerjaan dalam sisa waktu 90 hari kedepan. Karena sejauh ini, Bupati yang sempat keliling ke beberapa sudut ruangan menilai kwalitas pekerja sudah sesuai dengan kontrak kerja. "Hal-hal kecil itu berpengaruh, pada kualitasnya secara keseluruhan. Kami nggak mau kualitasnya ini setengah-setengah. Dana pemerintah banyak keluar untuk bangunan ini," katanya.

Menurut Bupati, proyek IRD RSUD menjadi proyek prestisius dari pemerintah daerah. Karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penyakit-penyakit yang spesifik dan selama ini tidak bisa tertangani di RSUD Buleleng, setelah dibangunnya RSUD Buleleng, diharapkan bisa tertangani.

"Biar kualitasnya terjaga. Pasien juganggak perlu jauh ke Denpasar. Jumlah kamar juga biar bertambah, karena jumlah kamar rumah sakit kita di Buleleng ini masih sangat kurang," imbuhnya.

Untuk diketahui, proyek RSUD Buleleng menelan dana Rp 44,6 miliar. Lebih rendah Rp 6,3 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 50,72 miliar. Proyek dimenangkan PT Tunas Jaya Sanur dan diproyeksikan tuntas pada akhir November nanti. Hingga Kamis (13/8) , proyek telah mencapai angka 61,3 persen. **k19**

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Anggaran Perubahan Dirasionalisasi ✓

Target SILPA Minus Rp 34 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Alokasi dana dihampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Buleleng, kini harus dirasionalisasi. Langkah itu menyusul target sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) pada tahun 2014 tidak tercapai.

Data yang dihimpun Kamis (13/8) menyebut, semula target SILPA pada APBD tahun 2014 dipasang sebesar Rp 127 miliar lebih. Sesuai regulasi, dana SILPA tersebut dipakai menutup defisit (kekurangan) dana pada APBD tahun 2015 yang jumlahnya juga mencapai Rp 127 miliar lebih. Dengan demikian, komposisi APBD tahun 2015, antara pengeluaran dengan pendapatan berimbang.

Namun, setelah APBD tahun 2014 tutup buku, ternyata SILPA yang dipasang sebesar Rp 127 miliar lebih itu hanya tercapai sebesar Rp 93 miliar lebih. Pencapaian SILPA tersebut berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibat pencapaian SILPA yang jauh dari target tersebut, sejumlah kegiatan dihampir SKPD dalam sisa waktu beberapa bulan di tahun 2015 ini, harus dipangkas. Paling tidak jumlah anggaran yang dipangkas tersebut mencapai Rp 34 miliar – sesuai kekurangan target capaian SILPA di tahun 2014.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng, Dewa Ketut Puspaka yang dkonfirmasi membenarkan SILPA yang dirancang pada tahun 2014 tidak tercapai. Dikatakan, hal itu terjadi karena beberapa kegiatan yang semula diperkirakan tidak bisa terlaksana di tahun 2014, justru berjalan sesuai waktunya.

Sehingga alokasi dana dari kegiatan tersebut yang semula diperkirakan akan menjadi SILPA justru dapat direalisasikan. "Ini bukan karena kesalahan kita memprediksi SILPA, tapi memang ada beberapa kegiatan yang diawal kita prediksi tidak jalan, justru bisa berjalan. Dan ini (APBD tahun 2014,red) juga atas pembahasan bersama dengan rekan-rekan di Dewan," terangnya.

Dijelaskan, kegiatan-kegiatan yang semula diperkirakan tidak bisa terlaksana di tahun 2014 diantaranya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Salah satunya kegiatan itu berada pada Dinas Pendidikan (Disdik), akibat keterlambatan dari petunjuk teknis (Juknis) dari penggunaan anggaran tersebut.

"Pengalaman kita sebelumnya, biasanya DAK di Dinas Pendidikan sering tidak bisa dimanfaatkan sesuai waktunya, karena juknisnya terbit sekitar bulan Nopember, sehingga sumber dana itu tidak bisa direalisasikan karena terbentur sisa waktu. Dari pengalaman tahun sebelumnya itu, kita prediksi di tahun 2014, dana itu akan kembali menjadi SILPA, tetapi justru petunjuk teknisnya terbit lebih awal, sehingga dananya bisa direalisasikan," jelas Puspaka selaku koordinator dari Tim Anggaran Eksekutif.

Disinggung rasionalisasi anggaran di masing-masing SKPD pada APBD Perubahan tahun 2015 akibat target SILPA tidak tercapai? Puspakan menegaskan, langkah itu harus diambil karena kegiatan-kegiatan yang semula dibiayai dari SILPA tidak bisa dilaksanakan. "Ini bukan dirasionalisasi, tapi kita lakukan evaluasi dan koreksi terhadap rencana-rencana yang kita matangkan dalam APBD perubahan ini," ujarnya.

Menurut Puspaka, koreksi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh banyak terhadap kepentingan masyarakat. Kegiatan yang dikoreksi tersebut diantaranya berupa dana perjalanan dinas, uang lembur dan lainnya. Disebutkan, untuk perjalanan dinas yang semula dirancang 5 kali dalam setahun, dikurangi menjadi 2 atau 3 kali. Demikian juga dengan uang lembur yang semula dirancang untuk pegawai yang kerja di luar jam kantor, kini dikurangi dengan tetap memperhatikan pencapaian kineria. k19

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung

4 Tersangka Pembeli Tanah Masih Tahap Pemberkasan

DENPASAR, NusaBali

Setelah menyeret eks Bupati Klungkung, I Wayan Candra yang divonis 12 tahun penjara serta Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) yang masih menunggu putusan, kini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung sedang memproses berkas empat tersangka yang merupakan pembeli tanah di lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung.

Empat tersangka pembeli tanah yang masih dalam tahap pemberkasan, yaitu Ni Made Anggara Junisari, IB Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati. "Ya sekarang masih dalam tahap pemberkasan," jelas Kasipidsus Klungkung, I Made Pasek Budiawan yang ditemui, Rabu (13/8).

Ia mengatakan setelah tahap pemberkasan selesai, barulah kasus ini bisa dilimpahkan untuk disidangkan. Namun ia belum bisa memastikan kapan kasus yang menjerat empat pembeli tanah ini sebagai tersangka bisa disidangkan. Pasalnya, saat ini penyidik masih fokus ke kasus dengan terdakwa Tim 9 yang tinggal menunggu putusan. "Yang pasti akan tetap kami proses," tegasnya.

Seperti diketahui, keempat tersangka tersebut merupakan pemilik tanah di lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung. Keempatnya dinyatakan sebagai tersangka setelah diketahui membeli tanah di areal Dermaga Gunaksa setelah lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi dermaga yang sudah tidak bisa diperjual belikan.

Salah satu saksi, Ni Made Anggara Junisari yang sempat dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar sebagai saksi mengaku tidak pernah membeli tanah di lokasi tersebut. Bahkan ia menyebut namanya dicatut oleh eks Bupati Klungkung, Candra untuk membeli tanah tersebut. Namun keterangan Anggara tersebut langsung dibantah oleh Candra dan diperkuat keterangan notaris yang membenarkan Anggara menandatangani akta jual beli tanah di lokasi tersebut.

Sementara itu, tersangka lainnya, IB Susila yang juga sempat dihadirkan sebagai saksi menyatakan hanya mendengar di lokasi tersebut akan digunakan investor asing untuk membuat akomodasi wisata.

Karena tergiur dan ada tawaran warga yang menjual tanah, iapun membeli tiga bidang tanah di lokasi tersebut dengan luas masing-masing 90 are, 34 are dan 69 are. Saat itu, Susila membeli sekitar bulan Oktober 2007 dengan harga Rp 8 juta per are. Baru sekitar 3 bulan, tepatnya pada Januari 2011 tanah yang dibelinya tersebut terkena pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa. Susila mengaku hampir sebagian besar tanahnya terkena pembebasan dan dibayar Rp 14 juta per are. **rez**

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Dugaan Korupsi Kelompok Sapi Fiktif

Tiga Terdakwa Dituntut Berbeda

DENPASAR, NusaBali

Tiga terdakwa kasus dugaan kelompok sapi fiktif di Desa Pucung Sari, Karangasem dituntut berbeda dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (13/8). Mangku Laba yang merupakan otak korupsi dituntut 3,5 tahun, sementara I Made Juliasa dan Ni Made Sumerta Yanti yang ikut membantu dituntut masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun.

Dalam amar putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dewa Gede Suardhita, Mangku Laba yang menjadi Ketua Kelompok Sapi Pucung Sari yang diketahui fiktif dinyatakan terbukti secara sah melakukan kegiatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi. Terdakwa dinilai telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama.

Laba dijerat pasal subsider pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, di antaranya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Serta hal meringankan yaitu sopan dan mengaku bersalah dalam sidang, JPU akhirnya menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Laba. "Menjatuhkan pidana selama 3,5 tahun penjara dikurangi masa penahanan," tegas JPU Echa Mariarta dkk.

Selain dituntut pidana penjara selama 3,5 tahun, Laba juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan serta dikenakan uang pengganti sebesar Rp 443 dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, dalam amar tuntutan untuk I Made Juliasa alias Kadek Juli, JPU menyatakan terdakwa bersalah sesuai pasal subsider pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan diantaranya sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.50 juta, JPU menuntut Kadek Juli dengan hukuman 2 tahun penjara dikurangi masa penahanan. Selain itu, Kadek Juli juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta mengganti kerugian negara Rp 50 juta.

Tuntutan yang sama juga dibacakan untuk Ni Made Sumerta Yanti alias Yanti. Wanita yang sedang hamil ini dinyatakan bersalah sesuai pasal subsider pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan diantaranya sudah mengembalikan kerugian negara Rp 7 juta, JPU akhirnya menuntut Yanti dengan pidana penjara 1,5 tahun. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan serta mengganti kerugian negara Rp 7 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan," tegas JPU. Sidang akan dilanjutkan pada, Kamis (20/8) mendatang dengan agenda pembacaan pledoi oleh kuasa hokum ketiga terdakwa yaitu Ketut Bakuh dkk. **rez**

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015
Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Kondisi Bangunan GOR SMAN 1 Susut Memprihatinkan

BANGLI, NusaBali

Seandainya Gedung Olah Raga (GOR) yang berlokasi di SMAN 1 Susut ini, dikelola sesuai aturan yang ada, maka dapat dipastikan bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan prestasi olahraga di sekolah setempat. Disamping itu, GOR tersebut juga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kegiatan lain, seperti pertemuan dan pergelaran pentas seni budaya olahraga dan sebagainya. Apalagi GOR yang dibangun dengan dana cukup besar ini telah dilengkapi stage atau panggung.

Namun sayang dalam pengerjaanya, proyek GOR tersebut diduga terjadi penyimpangan sehingga proses pengerjaanya menjadi mandeg. Malahan, kejanggalan pembangunan GOR ini kini tengah ditangani pihak Kajaksaan Negeri Bangli.

Pantauan di lokasi, kondisi GOR tersebut cukup memprihatinkan, dimana tembok GOR yang belum dilakukan finishing, kini tampak retak-retak, utamanya di ujung timur laut dan beberapa sisi lainnya.

Sementara pada podium tampak onggokan benda-benda yang tidak bermanfaat seperti bambu dan bekas plang nama milik sekolah itu. Sedangkan kondisi di lantai, begitu kumuh dan berdebu. Debu ini dihasilkan dari lantai yang mulai hancur dan mengelupas. Batu-batu kecil (koral) nampak berhamburan. Pada pintu masuk tampak pihak sekolah memasang bambu supaya siswa tidak memarkir kendaraan di dalam GOR. Hancurnya lantai GOR diduga kuat lantaran kualitasnya sangat rendah.

• NUSABALI/DEWA

KONDISI GOR SMAN 1 Susut, Bangli, sangat memprihatinkan, Kamis (13/8).

Menurut seorang guru di sekolah ini yang namanya enggan disebut, untuk rencana awal memang gedung ini diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh siswa maupun masyarakat umum lainnya. Disamping itu, GOR ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah seperti kegiatan kesenian, karena telah ada stagenya. "Namun seperti inilah kondisinya (GOR-red) saat ini," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah siswa sempat memarkir kendaraan di dalam GOR. Namun kini telah dilarang agar tidak memasukan kendaraan ke lokasi. "Paling sering mereka hanya melintas saja, supaya lebih singkat menuju kantin," ujar guru yang wanti-wanti namanya jangan dimuat.

Sementara Kepala SMAN 1 Susut, saat hendak dikonfirmasi mengenai GOR tersebut, tidak ada di tempat kerjanya. Menurut penjaga sekolah, yang bersangkutan tengah mengikuti pertemuan sesama kepala sekolah di Kintamani.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyimpangan pembangunan GOR ini tengah dilidik oleh Kejari Bangli yang saat itu dinahkodai Gede Nurmahendra. Malahan kasus penyeliikan ini, tengah masuk ke meja BPKP. Namun sejalan dengan pergantian tampuk pimpinan di Kajari Bangli, kasus ini lama mangkrak. Kini di bawah Kepala Kejaksaan, Ida Ayu Komang Retnasari Kusumadewi, penyelidikan kasus dugaan penyimpangan ini, bakal dilidik kembali. cr53

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015
Hal : 8